

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini akan penulis memaparkan simpulan dan rekomendasi setelah melakukan penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Penulis melakukan penafsiran dari hasil analisis dari penulis terhadap penelitian yang berjudul *Tentara Nasional Indonesia: Kiprahnya dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Bogor (1945-1949)*". Adapun rekomendasi berisi tentang masukan serta saran-saran yang ditujukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. 1 Simpulan

Pembentukan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak terlepas dari kesadaran pemerintah Republik Indonesia akan pentingnya membentuk tentara. Setelah masuknya Sekutu yang menjalankan tugasnya untuk membawa para tahanan perang Jepang dan membebaskan para tahanan Sekutu yang berada di Indonesia selama pendudukan Jepang, Namun keamanan menjadi tidak kondusif seiring dengan diketahuinya Sekutu yang diboncengi pemerintahan sipil Belanda NICA. Selain itu Sekutu mulai bertindak berlebihan dengan dikuasainya beberapa tempat-tempat penting seperti gedung-gedung pemerintahan, toko Dezon, Pabrik Ban Goodyear dan Istana Bogor yang nantinya diserahkan . Maka pecahlah beberapa pertempuran yang berpusat di daerah-daerah dan bertujuan untuk merebut kembali tempat-tempat penting tersebut. Pertempuran dengan Sekutu berakhir dengan adanya perjanjian dan gencatan senjata yang mempertemukan Sekutu dengan pemerintah Karesidenan Bogor pada 19 Januari 1945.

Perkembangan TNI diawali dari pemerintah RI yang menyadari bahwa permasalahan tidak lagi sekedar keamanan dan ketertiban saja namun sudah menyangkut kepada pertahanan dan kedaulatan negara itu sendiri. Maka dari itu ditengah pertempuran melawan Sekutu, pemerintah melakukan inisiatif dengan

membentuk tentara melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Tentara yang dibentuk dalam maklumat tersebut bernama Tentara Keamanan Rakyat. Dalam struktur ketentaraan yang dibentuk TKR, Bogor sendiri masuk kedalam TKR Resimen II yang dipimpin oleh Husein Sastranegara.

Perkembangan ketentaraan menuju TNI ini dilakukan ditengah perjuangan-perjuangan revolusi fisik yang ditempuh oleh Indonesia melawan agresi militer yang diluncurkan Belanda. Sebelum Agresi Militer I, pemerintah Republik Indonesia kembali melakukan restrukturisasi dengan kembali mengubah TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam struktur baru tersebut wilayah Bogor menjadi tugas TRI Komandemen I Siliwangi Jawa Barat Brigade II Suryakencana yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Edi Sukardi dan TRI Resimen Bogor dipimpin oleh Letnan Kolonel A.E Kawilarang. TRI pun tidak berlangsung lama, setelah itu kembali dilakukan restrukturisasi dan mengubah TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dan wilayah Bogor meenjadi tanggung jawab TNI Brigade II Suryakencana yang dipimpin oleh Letnan Kolonel A.E Kawilarang dan membaginya kedalam 6 batalyon.

Perjuangan TNI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam menghadapi Sekutu dan Belanda terjadi pada pertempuran-pertempuran di Bogor dan sekitarnya selama tahun 1945 hingga 1949. Pertempuran yang dilakukan oleh TNI di Bogor termasuk kedalam perjuangan pada awal kemerdekaan dengan mengawal tugas Sekutu dalam membawa para interniran Jepang, Agresi Militer Belanda I hingga Agresi Militer Belanda II dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia pada Konferensi Meja Bundar. Secara garis besar Agresi Militer Belanda membagi Bogor ke dalam beberapa wilayah pertempuran, yakni Kota Bogor dan Bogor Selatan, Bogor Barat, dan Bogor Utara yang termasuk Depok didalamnya dan Bogor Timur. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk ditengah-tengah pertempuran yang sedang berlangsung, tidak jarang disesuaikan dengan peristiwa pertempuran yang terjadi. Rekonstruksi dan restrukturisasi yang terus dilakukan

pemerintah terhadap ketentaraan demi untuk menjaga tugas tentara sebagai alat pemerintah dalam menjaga keamanan, pertahanan dan kedaulatan negara.

Perjuangan yang dilakukan TNI menghadapi Sekutu dan Belanda mempunyai dampak yang serius terutama terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia dan Bogor itu sendiri. Agresi Militer I Belanda masuk ke Bogor melalui Jakarta pada 21 Juli 1945 itu membuat kondisi keamanan dan pertahanan Bogor menjadi kacau. Brigade II Suryakencana melakukan pertahanan di seluruh wilayah Bogor. Agresi Militer I memaksa pemerintahan Karesidenan dan Kota Bogor harus mengungsi ke Sukabumi, sementara Kabupaten Bogor harus mengungsi ke daerah pedalaman Bogor Barat. Agresi Militer I Belanda berakhir dengan adanya Perundingan Renville yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Indonesia. Adanya Agresi Militer I yang dilakukan Belanda dan diakhiri dengan Perundingan Renville membuat wilayah Bogor dikuasai oleh Belanda sepenuhnya. Hal itu menyebabkan satuan TNI harus berpindah tempat ke wilayah Banten dan Jawa Tengah yang masuk kedalam daerah Republik Indonesia. Namun ada beberapa TNI dan laskar yang memilih tetap di daerah walaupun harus bergerilya untuk tetap menjaga daerahnya bila sewaktu-waktu Belanda menyerang.

Ditengah hijrahnya para satuan TNI, Belanda kembali menyerang wilayah Bogor untuk membersihkan para pejuang yang masih berada di Bogor pada Agresi Militer II pada 20 Desember 1948. Pada Agresi Militer II ini wilayah Bogor Barat yang banyak mengalami pertempuran. Pemerintahan Kabupaten Bogor pun semakin terdesak hingga ke daerah perbatasan Banten untuk tetap melaksanakan pemerintahannya. Agresi Militer II berakhir dengan adanya Perundingan Roem-Royen yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. Adanya perundingan tersebut menandakan pula bahwa selesainya pertempuran yang terjadi Indonesia terlebih di Bogor. Sebagai akhir dari pertempuran dan pengakuan kedaulatan Bogor dan Indonesia yang dilakukan oleh Belanda kepada Republik Indonesia di Bogor dilaksanakan di Gedung AVMJ Bogor yang diterima langsung oleh Residen Bogor pada saat itu Residen Ipin Gandamana.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Adapun saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas XI kurikulum 2013, penelitian ini dapat menunjang Kompetensi Inti nomor 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan Kompetensi Dasar nomor 3. yaitu
2. Bagi khasanah ilmu pengetahuan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah referensi mengenai sejarah revolusi dan sejarah lokal terutama untuk di daerah Bogor. Untuk mengenai sejarah revolusi, penelitian ini menuliskan bagaimana Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk dan berkembang pada revolusi yang terjadi di Indonesia. Perubahan badan tersebut hingga menjadi tentara menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Republik Indonesia saat itu. Untuk mengenai sejarah lokal, penulis melakukan bahwa BKR berjuang dalam mempertahankan wilayahnya untuk kedaulatan RI. Penulis menuliskan bagaimana perjuangan BKR dan perkembangan BKR dari badan keamanan menjadi tentara kebangsaan dalam mempertahankan wilayah Bogor menghadapi Sekutu dan Belanda.
3. Bagi penelitian selanjutnya khususnya mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia tentunya masih banyak hal yang bisa dikaji mengenai pembentukan dan perkembangan BKR ataupun badan-badan keamanan lain yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Terlebih pembentukan dan perkembangan BKR dalam kesatuan keamanan dan ketentaraan yang berada di berbagai lokal daerah mempunyai keunikan dan perjuangannya masing-masing dalam mempertahankan kemerdekaan RI.

125

Demikian simpulan dan rekomendasi yang dapat disampaikan oleh penulis, semoga bisa bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia dan meningkatkan pembelajaran di sekolah.